

STRATEGI KOMUNIKASI DALAM KEBIJAKAN INOVASI DAERAH

Arnia Fajarwati¹, Nia Pusparini², Emi Rachmawati³
FISIP Universitas Langlangbuana, Jl. Karapitan 116, 40261, Bandung, Indonesia, Telp. 022-4218084
arniafajar@gmail.com¹

ABSTRAK

Dalam era demokratisasi hak untuk berotonomi yang bertanggung jawab merupakan asas desentralisasi yang mutlak diterapkan di tataran pemerintahan daerah atau *local government*, untuk itu perlu direncanakan suatu strategi pembangunan yang berbasis pada kebijakan inovasi, karena inovasi dikenali sebagai model kebijakan yang dianggap berhasil saat ini. Agar kebijakan inovasi bisa sampai kepada *stakeholder* pembangunan di daerahnya maka diperlukan komunikasi, yang menurut Edward III Komunikasi adalah salah satu variable keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 3 (tiga) Faktor penentu keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan yaitu adanya proses transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Ketiga faktor penentu komunikasi tersebut dapat dilaksanakan dengan berdasarkan kepada strategi komunikasi dari Quinn (Ruslan 2008) yang menyatakan, agar suatu strategi komunikasi agar dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program, maka ia harus mencakup 7 (tujuh) hal: Mempercepat Tujuan yaitu harus Objektif yang jelas, Memelihara inisiatif yaitu Strategi membuat inisiatif, Konsentrasi yaitu Konsentrasi dengan melemahkan kekuatan yang besar, Fleksibilitas yaitu Strategi persenjataan, Kepemimpinan yaitu kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi, Kejujuran yaitu Strategi itu disiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan, Keamanan yaitu Strategi itu harus mengamankan seluruh organisasi. Apabila kebijakan inovasi daerah yang sudah digulirkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan strategi komunikasi tersebut maka akan mempercepat tujuan pembangunan di daerah.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi; Implementasi Kebijakan; Inovasi Daerah

COMMUNICATION STRATEGIES IN REGIONAL INNOVATION POLICIES

ABSTRACT

In the era of democratization, the right to responsible autonomy is a principle of decentralization that is absolutely applied at the level of local government, for this reason, it is necessary to plan a development strategy based on innovation policies, because innovation is recognized as a policy model that is considered successful today. In order for innovation policies to reach development stakeholders in their regions, communication needed, which according to Edward III Communication is one of the variables for the success of policy implementation, there are 3 (three) determining factors for communication success in policy implementation, namely the transmission process (transmission), clarity and consistency (consistency). The three determining factors of communication can be carried out based on the communication strategy from Quinn (Ruslan 2008) who stated, in order for a communication strategy to be effectively implemented in a program, it must include 7 (seven) things:

Accelerating Goals, namely must be clear Objectives, Maintaining initiatives, namely Strategies for making initiatives, Concentration by weakening great strength, Flexibility i.e. Armament strategy, Leadership i.e. committed and coordinated leadership, Honesty i.e. Strategy is prepared to utilize confidentiality and intelligence, Security i.e. Strategy it must secure the entire organization. If the regional innovation policy that has been rolled out by the government can be implemented with this communication strategy, it will accelerate development goals in the regions.

Keywords: *Communication Strategy; Policy Implementation; Regional Innovation*

PENDAHULUAN

Kebijakan sistem desentralisasi di Indonesia sudah melahirkan beberapa fase pemerintahan sejak pasca kemerdekaan sampai dengan pasca reformasi, dengan adanya desentralisasi maka pemerintahan daerah diberi hak untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintahan nasional, karena dengan adanya desentralisasi diharapkan berdampak positif pada pembangunan daerah dalam rangka otonomi tersebut, untuk itu pemerintah daerah perlu merancang suatu strategi inovasi daerah yang dimaksudkan untuk merencanakan pembangunan di daerahnya dalam upaya mencapai masyarakat yang sejahtera. Strategi inovasi daerah tersebut dapat diaplikasikan pada daerah dari skala propinsi hingga yang terkecil yaitu berupa skala desa. Untuk menjamin kemandirian dan kesinambungan dari pelaksanaan strategi tersebut, maka strategi tersebut seyogyanya bertujuan untuk membangun

ekonomi suatu daerah berbasis dari sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut (*resource-based*).

Salah satu model inovasi kebijakan yang populer dan berkembang pesat sejak awal tahun 1990-an adalah Sistem Inovasi Daerah (*regional innovation system – RIS*). Konsep Sistem Inovasi Daerah (SID) menjadi konsep yang banyak diteliti menyusul banyaknya kegagalan dalam implementasi model-model pengembangan daerah tradisional. SID bermula dari dua bidang teori dan riset yaitu sistem inovasi (*system of innovation*) dan sains regional (*regional science*) (Doloreux 2005). Sistem inovasi berbasis dari teori perubahan ekonomi dan teknologi secara evolutif sehingga memfokuskan pada konseptualisasi inovasi sebagai evolusi proses sosial. Sedangkan teori-teori sains regional memfokuskan pada lingkungan dari mana inovasi dapat muncul sehingga faktor kedekatan juga menjadi hal yang utama. Kebijakan inovasi yang bertujuan untuk mendukung SID menggunakan

model-model inovasi yang banyak menjadi obyek penelitian para peneliti.

Studi tentang inovasi kebijakan publik telah lama dilakukan dalam konteks negara maju seperti studi yang dilakukan oleh Osborne & Gaebler (Osborne and Gaebler 1996) dan Denhardt & Denhardt (Denhardt and Denhardt 2003). Kebijakan tersebut dianggap inovatif karena menawarkan pemenuhan kebutuhan publik yang berbasis efektivitas dan efisiensi yang disebut *New Public Management* (NPM). Kebijakan yang ada juga harus adaptatif dengan kondisi zaman yang semakin mementingkan pola jaringan antar tingkat pemerintahan, lembaga, stakeholder, bahkan masyarakat untuk optimalisasi pelayanan, sehingga penerapan untuk konsep komunikasi dalam implementasi kebijakan inovasi daerah tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Komunikasi Dalam Inovasi

Kebutuhan komunikasi dalam inovasi menjadi hal yang mutlak terutama untuk mengurangi kesenjangan informasi antara masyarakat perkotaan sebagai sumber informasi kepada masyarakat di pedesaan yang dianggap masih cukup lebar. Akses informasi yang terbatas mengakibatkan masyarakat kurang memiliki ide dan berinovasi untuk

memberdayakan potensi wilayahnya. Sementara Menurut Effendy (Effendy 2007) ciri-ciri komunikasi yang baik dan efektif paling tidak menimbulkan hal: a. Pengertian, yaitu penerimaan yang cermat dari isi stimuli seperti apa yang dimaksud oleh komunikator. b. Kesenangan, yaitu menjadikan hubungan yang hangat dan akrab serta menyenangkan. c. Mempengaruhi sikap, yaitu dapat mengubah sikap orang lain sehingga bertindak sesuai dengan kehendak komunikator tanpa merasa terpaksa. d. Hubungan sosial yang baik, yaitu menumbuhkan dan mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam hal interaksi. e. Tindakan, yaitu membuat komunikasi melakukan suatu tindakan yang sesuai dengan stimuli.

Sebuah studi menyatakan bahwa komunikasi bisa efektif dan efisien yaitu dengan membuat sebuah strategi komunikasi, strategi komunikasi menurut Effendy (Effendy 2007) mengenai strategi komunikasi dapat dijelaskan sebagai paduan dan perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut Effendy (Effendy 2007) menyatakan pada hakikatnya, strategi adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen

(*management*) untuk mencapai suatu tujuan.

Tujuan strategi komunikasi menurut R.Wayne Pace, Brent D Peterson dan M.Dallas Burnet (Effendy 2007) yaitu yang pertama adalah *to secure understanding*, memastikan bahwa penerima pesan mengerti pesan yang diterimanya. Dan apabila sudah dapat mengerti dan menerima, maka yang diterima tersebut itu harus dijalin atau dibina (*to establish acceptance*). Yang pada akhirnya setelah dimengerti, kemudian dijalin atau dibina, maka selanjutnya kegiatan dimotivasi (*to motivate action*).

Quinn (Ruslan 2008) menyatakan, agar suatu strategi komunikasi agar dapat efektif dilaksanakan dalam sebuah program, maka ia harus mencakup beberapa hal:

1. Mempercepat Tujuan yaitu harus Objektif yang jelas dan menentukan semua ikhtiar diarahkan untuk mencapai pemahaman yang jelas, menentukan dan bisa mencapai keseluruhan tujuan. Tujuan tersebut tidak perlu dibuat secara tertulis namun yang penting bisa dipahami dan ditentukan.
2. Memelihara inisiatif. Yaitu Strategi inisiatif menjaga kebebasan bertindak dan menyempurnakan

penghilangan. Strategi harus menentukan langkah dan memunculkan tindakan terhadap peristiwa, bukannya mengubah satu peristiwa.

3. Konsentrasi yaitu Konsentrasi dengan melemahkan kekuatan yang besar untuk waktu dan tempat yang menentukan.
4. Fleksibilitas yaitu Strategi persenjataan diniatkan untuk dilengkapi penyanggah dimensi untuk fleksibilitas dan manuver.
5. Kepemimpinan yaitu Kepemimpinan yang memiliki komitmen dan terkoordinasi. Strategi keinginan memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap keinginan tujuan pokok.
6. Kejujuran yaitu Strategi itu disiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak terduga.
7. Keamanan. Yaitu Strategi itu harus mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi.

Di sisi lain banyak hasil penelitian potensial yang bisa diterapkan oleh masyarakat menjadi inovasi bagi pengembangan pelayanan publik sekalipun di daerah terbelakang, Kesenjangan informasi terkait inovasi ini bisa di selesaikan dengan komunikasi inovasi, atau disebut juga sebagai difusi inovasi untuk daerah yang lebih jauh tertinggal dan

terjangkau media. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa komunikasi inovasi merupakan cara menyampaikan penemuan gagasan baru kepada masyarakat agar terjadi suatu perubahan sosial.

Konsep Komunikasi dalam inovasi bisa diadopsi dari pendapat Rogers (Rogers 1995) mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Menurut Rogers (Rogers 1995) sedangkan kecepatan komunikasi atau difusi sebuah inovasi bisa dipengaruhi oleh empat elemen, yaitu Karakteristik, Kanal Komunikasi, Waktu Komunikasi Inovasi dan Sistem Sosial.

(1) Karakteristik Inovasi

Dalam hal ini, Rogers berpendapat berdasar hasil meta analisis terhadap ribuan penelitian tentang adopsi inovasi menyimpulkan terdapat lima karakteristik umum inovasi yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu *relative advantage, compatibility, complexity, observability, dan trialability*.

(a) *Relative advantage* menunjukkan sejauh mana inovasi lebih dari inovasi

sebelumnya. Manfaat ini dapat diukur, baik dengan ukuran ekonomi, prestise, kenyamanan, maupun kepuasan.

(b) Karakteristik inovasi yang kedua adalah *compatibility* yang merujuk kepada kesesuaian inovasi terhadap nilai-nilai yang sudah ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan. Kesesuaian inovasi dengan ide-ide sebelumnya akan mempercepat adopsi, dan sebaliknya pengalaman buruk atas sebuah inovasi akan menghambat adopsi.

(c) Karakteristik ketiga adalah *Complexity* yaitu karakteristik untuk mengukur tingkat kesulitan atau kemudian sebuah inovasi untuk dipelajari dan digunakan. Semakin mudah sebuah inovasi digunakan, semakin cepat kecepatan adopsinya.

(d) Karakteristik yang keempat adalah *observability* yang mengukur seberapa jelas penampakan inovasi. Jika sebuah hasil sebuah inovasi mudah dilihat dan dikomunikasikan maka difusinya akan semakin cepat.

(e) Karakteristik inovasi yang kelima *trialability* Suatu inovasi yang dapat diujicobakan dalam seting sesungguhnya umumnya akan lebih cepat diadopsi, jadi agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi harus mampu mengemukakan seunggulannya.

(2) Kanal komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan manfaat inovasi;

Terkait dengan kanal komunikasi, semakin besar jangkauan kanal komunikasi yang digunakan untuk mengkomunikasikan inovasi, semakin cepat inovasi yang terjadi. Kanal komunikasi media massa efektif untuk menginformasikan sebuah inovasi ke calon pengguna, sedang komunikasi interpersonal efektif untuk mempengaruhi individu untuk menerima sebuah inovasi.

(3) Waktu sejak inovasi diperkenalkan;

Rogers (Rogers 1995) juga membedakan orang yang mengadopsi inovasi berdasar waktu menjadi *innovator*, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggard*. Jumlah kumulatif orang yang mengadopsi inovasi secara ideal akan mendekati kurva S, yang bermula pada nilai yang rendah, kemudian naik dengan cepat dan akhirnya mencapai kondisi yang stagnan atau hanya bertambah sedikit.

(4) Sistem sosial tempat inovasi berdifusi.

Terkait dengan system sosial, sebuah inovasi akan berdifusi dengan cepat pada sistem sosial yang homogen. Menurut Rogers (1983) dalam proses

difusi inovasi terdapat berbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitu:

(a) Tahap *Awareness* (Kesadaran), yaitu tahap seseorang tahu dan sadar ada terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut.

(b) Tahap *Interest* (Keinginan), yaitu tahap seseorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut.

(c) Tahap *Evaluation* (Evaluasi), yaitu tahap seseorang membuat putusan apakah ia menolak atau menerima inovasi yang ditawarkan sehingga saat itu ia mulai mengevaluasi.

(d) Tahap *Trial* (Mencoba), yaitu tahap seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya sehingga ia mulai mencoba suatu perilaku yang baru.

(e) Tahap *Adoption* (Adopsi), yaitu tahap seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku baru tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik

Gagasan “kebijakan” dalam bahasa Indonesia adalah seperangkat aksi atau rencana yang mengandung tujuan politik

(Wilson (Parsons 2008, 14)). Sejak periode pasca Perang Dunia II. Kata '*policy*' mengandung makna kebijakan sebagai sebuah *rationale*, sebuah manifestasi dari penilaian penuh pertimbangan. Sebuah kebijakan adalah usaha untuk mendefinisikan dan menyusun basis rasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan (Parson, 2008: 14). Kata "publik" secara terminologi mengandung arti sekelompok orang atau masyarakat dengan kepentingan tertentu.

Intervensi terhadap publik oleh pemerintah ataupun oleh aturan sosialnya mendorong terjadinya perubahan-perubahan terhadap publik melalui usaha-usaha yang telah direncanakan. Terlepas dari perubahan tersebut membawa dampak yang bersifat baik maupun dampak yang bersifat buruk. Usaha pemerintah untuk merespon kepentingan publik ini adalah yang disebut dengan kebijakan publik. Easton (Nugroho 2014, 23) mendefinisikan kebijakan publik sebagai dampak dari upaya pemerintah. Menurut Osborne (Marijan 2010, 6), dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang berkembang di dalam masyarakat, sistem politik dapat menempuhnya melalui dua cara. Pertama, membuat keputusan-keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, melakukan politisasi,

yaitu membangun nilai-nilai yang ada di dalam pemerintahan.

Thomas R. Dye (Syafi'ie 2006, 105) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "*whatever government choose to do or not to do*" yang dalam bahasa Indonesia berarti apapun juga yang dipilih pemerintah, baik mengerjakan sesuatu ataupun tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu. Ada juga pendapat RC Chandler dan JC Plano (Syafi'ie 2006, 105) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Pada perwujudan secara riil dari kebijakan, tapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan tersebut.

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi sebuah peraturan jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni

dilaksanakan oleh badan-badan yang terkait.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan

Hasil diskusi *The Indonesian Science Technology Innovation (STI) Policy Lecture Series I – 2021* menyimpulkan bahwa Mengomunikasikan kebijakan untuk publik lebih penting dari sekadar mensosialisasikan kebijakan tersebut. Komunikasi kebijakan berarti melibatkan publik sejak dari penyusunan kebijakan itu sendiri. Sementara sosialisasi kebijakan hanya fokus pada pemberitahuan kepada publik tanpa ada keterlibatan dalam proses penyusunan kebijakan. Menurut Riant Nugroha pada diskusi tersebut, sebuah kebijakan publik akan berjalan efektif apabila publik menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan itu sendiri. Publik perlu didengar pendapat mereka sejak kebijakan disusun atau direncanakan.

Proses pelibatan publik sedari awal kebijakan disusun merupakan bagian dari mengomunikasikan kebijakan. Lantaran komunikasi yang buruklah yang membuat kualitas kebijakan tidak efektif. Namun, ia menggarisbawahi komunikasi kebijakan kepada publik membutuhkan waktu dan cara-cara yang efisien. Komunikasi kebijakan yang baik dan efisien akan

membuat publik atau masyarakat umum akan paham dan bisa melaksanakan kebijakan tersebut, pendapat lain menambahkan bahwa komunikasi merupakan salah satu variabel penting dalam penyusunan kebijakan, variabel tersebut memuat sejumlah hal, seperti sejauh mana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada rakyat, sejauh mana rakyat dilibatkan dalam penyusunan isi kebijakan, dan apakah rakyat memahami bahwa kebijakan tersebut bermanfaat atau tidak dan sudah pasti dalam proses komunikasi kebijakan dibutuhkan sumber daya yang cukup, seperti sumber daya manusia, pendanaan, dan peralatan. Sumber daya tersebut dibutuhkan untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan kebijakan sampai ke level paling bawah.

Peran komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari pendapat Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact On Implementation* (Agustino 2016) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur

Birokrasi. Menurut George Edward III (Agustino 2016) Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. Menurut Edward III (Widodo 2010, 97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III (Widodo 2010, 97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Edward III (Widodo 2010, 97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, faktor atau dimensi penentu keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan menurut Edward III adalah adanya dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang

berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

Variabel atau faktor ketiga adalah Disposisi adalah watak dan karakteristik

yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif.

Variabel atau Faktor keempat menurut George Edward III adalah Struktur Birokrasi. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas implementasi kebijakan menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan Inovasi Daerah

Kinerja *governance* yang baik diyakini menjadi aspek yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat. O'Toole dan

Meier (2005) menginterpretasi *governance* dalam dua aras penting yaitu *governance* sebagai studi tentang konteks struktural dari organisasi atau institusi pada berbagai level (*multi layered structural contex*) dan *governance* sebagai studi tentang *network* yang menekankan pada peran beragam aktor sosial dalam sebuah jejaring negosiasi, implementasi, dan pembagian hasil.

Begitu pula dalam kinerja pemerintah lokal sangat ditentukan oleh kualitas *network* (Klijn 2008). Pemerintah lokal seringkali tidak memiliki kemampuan untuk mengelola berbagai stakeholder yang terlibat. Padahal, *network* dapat dibangun dalam berbagai macam cara. Konsep *local network governance* berupaya untuk secara komprehensif berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah publik melalui integrasi peran, serta layanan publik yang diselenggarakan bersama-sama.

Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) sebagai bagian integral dari penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) (Handayani, Sophoaningrum and Kusharsanto 2012). Sistem inovasi baik di daerah maupun nasional memiliki tujuan untuk menumbuhkan kreativitas

dan inovasi untuk penguatan daya saing produk-produk yang dihasilkan berhadapan dengan produk serupa dari daerah maupun negara lain (Ruswandi 2013). Tanpa inovasi, maka dapat dipastikan bahwa daerah ataupun negara secara keseluruhan akan ditinggalkan dan pada akhirnya akan mengalami kemunduran dalam segala aspek kehidupan, di tengah kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat. Inovasi daerah yang terintegrasi dengan inovasi nasional menjadi sebuah keharusan bagi penguatan daya saing daerah dan nasional yang berkelanjutan (Suresti, et al. 2017). Berikut kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia yang menjadi landasan dalam pelaksanaan inovasi daerah;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menuangkan bahwa;

- a. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi (Pasal 386)
- b. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7).
- c. Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9)

- d. Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

- a. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pasal 1) Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana. (Pasal 389) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri (Pasal 388 ayat 7)
- b. Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari kepala Daerah. (Pasal 22) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 388 ayat 9)

- c. Penilaian terhadap penerapan hasil Inovasi Daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah (Pasal 23)
3. Permendagri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah
- a. Penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah (Pasal 1)
 - b. Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu (Pasal 1).

Mengenai Bentuk Inovasi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
2. Inovasi pelayanan publik, dan/atau merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik

3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah

Sedangkan Kriteria Inovasi Daerah adalah sebagai berikut;

1. Merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
2. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi
3. Memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat
4. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Dapat direplikasi

SIMPULAN

Strategi Komunikasi adalah perencanaan dalam penyampaian pesan melalui kombinasi berbagai unsur komunikasi sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dapat mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan tujuan komunikasi, strategi komunikasi dapat efektif dengan menggunakan strategi komunikasi dari Quinn yaitu adanya Tujuan, Inisiatif, Konsentrasi, Fleksibilitas, Kepemimpinan dan Keamanan.

Implementasi Kebijakan adalah serangkaian aktifitas yang terlihat dan meliputi upaya mengelola *input* menjadi *output* atau *outcomes* bagi masyarakat dengan menggunakan model dimensi atau variabel komunikasi dari Edward III yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi yaitu tranmisi, kejelasan dan konsistensi.

Inovasi Daerah adalah sarana pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang produktif efektif dan efisien dengan mengembangkan berbagai potensi atau sumber daya yang dimiliki daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta. Hal. 126., 2016.
- Denhardt, Janet V., and Robert B. Denhardt. *The New Public Service: serving, not steering*. New York: ANSI, 2003.
- Doloreux, D. & Parto, S. "Regional Innovation System: Current discourse and unresolved issues." *Technology in Society*, 27, 2005: 133-153.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Handayani, Setyono, Sophoaningrum, and Kusharsanto. "Sistem Inovasi Nasional (SIN)." <http://jurnal.univrab.ac.id>, 2012.
- Klijjn, EH. "Governance and Governance Networks in Europe: An Assessment of 10 years of research on the theme." *Public Management Review*, vol. 10, terbitan 4, 2008: 505-525.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010.
- Nugroho, Riant. *Public Policy*. Jakarta: Erwan Agus Media Komputindo, Hal.357, 2014.
- Osborne, David, and Ted Gaebler. *Mewirauahakan Birokrasi, terj, Abdul Rasyid*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1996.
- Parsons, Wayne. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group , 2008.
- Rogers, Everett, M.,. *Diffusion Of Innovations (4 th ed)*. Glencoe,II: The Free Press., 1995.
- Ruslan, R. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Bandung: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Ruswandi, Agus. "The Study Of Strengthening Regional Innovation Systems West Java." *Jurnal Bina Praja | Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret*, 2013: 27 - 34.
- Suresti, Amna, Uyung Gatot S Dinata, James Hellyward, and Rahmi Wati. "Pemetaan Tingkat Kematangan Sistem Inovasi Daerah Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi Vol I No 1*, 2017.
- Syafi'ie, Inu Kencana dkk. *Ilmu Administrasi Publik, edisi kedua*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Widodo, Joko. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2010.